

Sosialisasi Peran Multipihak dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kalimantan Barat melalui *Forum Group Discussion*

¹Arie Antasari Kushadiwijayanto, ²Setra Kusumardana, ³Ikha Safitri, ⁴Warsidah, ⁵Mega Sari Juane Sofiana, ⁶Sukardi

¹Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat

^{2,4,5,6}Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, Kalimantan Barat

³SMA Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat

Email Corresponding: isafitri@marine.untan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pengelolaan Pesisir Kawasan Konservasi Laut <i>Edutourism</i> Kelautan dan Perikanan Masyarakat Pesisir	Kalimantan Barat memiliki potensi ekosistem pesisir dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti mangrove, lamun, terumbu karang, dan sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu, di beberapa Kabupaten pesisir Kalimantan Barat juga ditemukan biota endemik, biota yang dilindungi maupun terancam punah. Potensi tersebut menjadi dasar penetapan lima kawasan konservasi perairan di Kalimantan Barat. Dalam rentang waktu 2019 – 2023, pengelolaan kawasan konservasi Kalimantan Barat menghadapi banyak tantangan sekaligus menawarkan banyak peluang yang dapat dilakukan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang konservasi dan pengelolaan laut secara berkelanjutan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Yayasan Webe Konservasi Ketapang, dan Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Tanjungpura melakukan kolaborasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mempercepat usaha pengelolaan KKPD secara berkelanjutan. <i>Focus Group Discussion</i> dan seminar membahas tantangan dan peluang dalam mengembangkan usaha konservasi inklusif yang berkelanjutan sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat pesisir. Untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan yang efektif, diperlukan adanya peran multipihak. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat pesisir dapat mewujudkan solusi inovatif dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Keywords: Coastal Management Marine Conservation Area <i>Edutourism</i> Marine and Fisheries Coastal Community	West Kalimantan has the potential for coastal ecosystems with high levels of biodiversity, such as mangroves, seagrass, coral reefs, marine and fisheries resources. Furthermore, endemic biota, protected and threatened biota are also found in several coastal districts of West Kalimantan. This potential is the basis for establishing marine conservation areas in West Kalimantan. In the period 2019 – 2023, the management of conservation area in West Kalimantan faces many challenges as well as offering many opportunities. The biggest challenge was the lack of community awareness about conservation and sustainable management of coastal area. Department of Marine Affairs and Fisheries West Kalimantan, Webe Konservasi Foundation Ketapang, and Marine Science Department Tanjungpura University collaborate through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program to accelerate sustainable management of the Marine Conservation Area in West Kalimantan. Focus Group Discussion and seminars discussed challenges and opportunities in developing sustainable, inclusive conservation efforts as an economic source for coastal communities. To ensure the sustainability of marine and fisheries resources and effective management, a multi-stakeholder role is needed. Collaboration between academics, government and coastal communities creates innovative solutions and commitments to support the sustainability of the marine environment and the welfare of local communities.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat memiliki 5 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 dengan total luasan sebesar 644.674,16 Ha. Penetapan kawasan konservasi tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung amanat Presiden dalam mencapai target luasan kawasan konservasi 30% pada Tahun 2045 untuk menjaga ketahanan stok ikan nasional. Pengelolaan KKPD secara terpadu dan inklusif menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumberdaya alam. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di kawasan. Beberapa penelitian sebelumnya, masyarakat berperan penting dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif (Qodriyatun, 2019) dan diperlukan peningkatan inklusivitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Pereira *et al.*, 2021; Wibisono *et al.*, 2023). Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan, membangun kapasitas pengelolaan lokal, dan memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup (Iannuzzi *et al.*, 2019). Pelibatan tersebut mencakup kegiatan ekowisata bahari, budidaya perikanan laut berkelanjutan, pengembangan produk-produk lokal, dan sektor ekonomi kreatif masyarakat.

Pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat dalam rentang waktu 2019 – 2023 menghadapi banyak tantangan sekaligus menawarkan banyak peluang yang dapat dilakukan. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan KKPD adalah kurangnya kesadartahuan masyarakat tentang konservasi dan pengelolaan laut berkelanjutan. Untuk mengisi ruang itu, DKP Provinsi Kalimantan Barat, Yayasan Webe Konservasi Ketapang, dan PS Ilmu Kelautan Universitas Tanjungpura melakukan kolaborasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mempercepat usaha pengelolaan KKPD secara berkelanjutan. Percepatan usaha dilakukan dengan program pendampingan pengawasan lingkungan, rehabilitasi pesisir, pendataan biofisik dan sosekbud, *Focus Group Discussion*, dan pendampingan usaha masyarakat (ekowisata, budidaya perikanan, pengembangan produk perikanan, dan kerajinan berbasis sumberdaya lokal). Kegiatan kolaborasi ini mengalami kemajuan pesat dengan terus adanya peningkatan partisipasi dan kesadartahuan masyarakat terhadap konsep konservasi inklusif dan pengelolaan pesisir berkelanjutan. FGD dan Seminar "Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat" membahas tantangan dan peluang dalam mengembangkan usaha konservasi inklusif yang berkelanjutan sebagai sumber perekonomian bagi masyarakat pesisir. Acara ini juga akan menyoroti peran penting pendataan dan kajian sumber daya kelautan dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Dengan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat pesisir, diharapkan akan muncul solusi inovatif dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan peran penting akademisi (Tridharma Perguruan Tinggi) dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat, meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir mengenai pentingnya pelestarian sumberdaya laut dan peran aktif mereka dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan membangun jaringan dan kemitraan yang kuat antara akademisi, masyarakat pesisir, dan pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat.

II. MASALAH

Kalimantan Barat memiliki garis pantai sepanjang ± 1.398 km, luas perairan laut sebesar 30.364,59 km², dan pulau-pulau kecil berpenghuni maupun tidak. Selain itu, Kalimantan Barat juga memiliki potensi ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove dengan luas 229.396,60 Ha, terumbu karang 269.563,22 ha, padang lamun, dan sumberdaya ikan lestari mencapai 230.000 ton per tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, 2019). Di beberapa Kabupaten/Kota pesisir Kalimantan Barat ditemukan biota endemik, biota yang dilindungi maupun terancam punah. Potensi tersebut menjadi dasar penetapan kawasan konservasi perairan di Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, terdapat lima (5) KKPD Kalimantan Barat, yaitu KKP3K Paloh dan Perairan sekitarnya, KKP3K Pulau Randayan dan Perairan sekitarnya, KKP Kubu Raya dan Kayong Utara, KKP3K Kendawangan dan Perairan sekitarnya, KKP3K Kubu Raya dan Perairan sekitarnya. Kalimantan Barat dengan potensi wilayah pesisir dan laut dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, diperlukan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan berbasis konservasi untuk perlindungan biota, ekosistem perairan, dan pemanfaatan lain seperti pendidikan dan ekowisata. Untuk menjamin

keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan yang efektif, maka diperlukan adanya peran multipihak.



Gambar 1. Peserta kegiatan FGD dan Seminar di Ruang Teater 1 Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura

III. METODE

Kegiatan FGD dan Seminar "Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat" dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 di Ruang Teater 1, Gedung Konferensi, Universitas Tanjungpura. Kegiatan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Kubu Raya, Instansi Pusat (BPSPL Pontianak, PSDKP, BKSDA, BPDAS Kalimantan Barat, Balai Taman Nasional Gunung Palung, Danlantamal XII, Danlanal Ketapang), Perguruan Tinggi (UNTAN, UNOSO, UNU, UMP, POLNEP, POLITAP), Mitra NGO (Yayasan Webe Konservasi Ketapang, Yayasan Planet Indonesia, Blue Forest, Fauna & Flora International, Yayasan IAR Indonesia), jurnalis/media nasional, dan perwakilan masyarakat.



Gambar 2. Flyer Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar "Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat"

Kegiatan FGD dan seminar dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Persiapan
Persiapan kegiatan diawali dengan adanya inisiasi oleh Yayasan Webe Konservasi Ketapang dan PS Ilmu Kelautan UNTAN, rapat koordinasi panitia pelaksana, dilanjutkan dengan audiensi ke Rektor UNTAN dan beberapa *stakeholder* terkait
2. Pelaksanaan
Kegiatan dibuka oleh ketua LPPM Universitas Tanjungpura Dr.-Ing. Ir. Eka Priadi, MT, dilanjutkan sesi pemaparan program dan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan oleh DKP Kalbar, Yayasan Webe

Konservasi Ketapang, dan PS Ilmu Kelautan Untan dalam upaya pemanfaatan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi *talkshow* dengan Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan (Dionisius Endy Vietsaman, M.M.P.), Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya (Rini Kurnia Solihat, S.STP., M.A.), Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara (Dr. H. Tasfirani, M.Pd.), dan Akademisi dari Universitas Tanjungpura (Ikha Safitri, S.Pi., M.Si.). Sesi terakhir adalah *sharing session* oleh mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pulau Cempedak, Desa Sungai Nibung, Karimata, dan Yayasan Planet Indonesia (YPI)

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan dengan memberikan pertanyaan kepada peserta terkait dengan materi diskusi. Bagi peserta yang terpilih, diberikan hadiah (*gift*) oleh panitia pelaksana

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sesi pembukaan, dipaparkan tentang program dan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan oleh DKP Kalimantan Barat, Yayasan Webe Konservasi Ketapang, dan PS Ilmu Kelautan Untan dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat. Beberapa kegiatan yang terlaksana dari kerjasama tersebut, antara lain pendataan bioekologi, inventarisasi ikan hasil tangkapan nelayan, pendataan sampah makro, pengembangan ekowisata, mitigasi bencana, pengembangan website berbasis sistem informasi yang terintegrasi, serta diversifikasi olahan berbasis produk laut untuk menambah *added value*. Pada kesempatan tersebut, dipaparkan juga rencana program tahun 2024 untuk pengembangan *edutourism* berbasis konservasi laut, yaitu (1) ekspedisi pelayaran pendidikan seri pesisir pulau kecil Kepulauan Karimata dan Kendawangan, dan (2) seri Kubu Raya Estuary Cruise. Rencana program tersebut diharapkan dapat menambah nilai manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat pesisir Kalimantan Barat.



Gambar 3. Program dan kegiatan kerjasama dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat

Pada sesi FGD, diskusi dibuka dengan pemaparan oleh Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan tentang mekanisme dan aturan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Kalimantan Barat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub bidang urusan KP3K memiliki tiga tugas pokok yaitu (1) pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil, (2) penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut < 12 mil, serta (3) pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu kegiatan dalam pengelolaan ruang laut yaitu pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dapat dilakukan dengan kerjasama multipihak, antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Hasil-hasil penelitian dari akademisi perlu diperkuat sebagai basis dalam perumusan kebijakan.



Gambar 4. Sesi *Focus Group Discussion* (FGD) dan Seminar "Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat"

Salah satu aktivitas dalam pemanfaatan kawasan konservasi dapat dilakukan dengan *edutourism*, yaitu wisata yang berbasis pendidikan. Dalam konteks ini, istilah pendidikan berkaitan dengan alternatif pariwisata yang menghubungkan individu dengan aspek pendidikan yang mencakup budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, atau lingkungan (Pulido-Fernández *et al.*, 2019). *Edutourism* merupakan wisata yang memanfaatkan dan menyediakan media edukasi dari potensi wisata yang berbasis pada sumberdaya alam, produk masyarakat, pemberdayaan masyarakat, maupun kearifan lokal (*local wisdom*) (Sulaiman *et al.*, 2019). *Edutourism* dapat bertujuan untuk menjadikan lokasi wisata sebagai tempat pendidikan, praktek kerja, maupun sarana pelestarian alam bagi semua kalangan. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan di kawasan konservasi laut Kalimantan Barat dengan menerapkan konsep keberlanjutan. *Edutourism* memberikan keberlanjutan dari berbagai aspek kehidupan (Sumarmi *et al.*, 2022). Pendidikan yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata dapat menjamin kelestarian lingkungan (Ioppolo *et al.*, 2013; Slocum *et al.*, 2019) dan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, pendidikan dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan kurikulum secara menyeluruh (Mínguez *et al.*, 2021). Oleh karena itu, *edutourism* dapat menjadi faktor utama dalam pengembangan pariwisata di masa yang akan datang.



Gambar 5. Sesi *sharing session* Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kawasan Konservasi Laut Kalimantan Barat

Sesi *sharing session* diisi dengan berbagi pengalaman dari mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di kawasan konservasi laut Kalimantan Barat. Secara umum, mereka baru pertama kali mengunjungi lokasi tersebut. Namun, banyak pengalaman berharga dan kesempatan belajar secara langsung di lapangan. Pembelajaran melalui skema MBKM dapat meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa, seperti kemampuan *public speaking*, penguatan jejaring/kerjasama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berinteraksi sosial, empati, dan kemampuan dalam pemecahan masalah (*problem solving*). Peran mahasiswa pada saat melakukan kegiatan di kawasan pesisir diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan dapat menularkan energi positif kepada masyarakat.

V. KESIMPULAN

Penguatan peran dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat direalisasikan dengan membangun kerjasama dan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat pesisir sehingga muncul solusi inovatif dan komitmen untuk mendukung keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Yayasan Webe Konservasi Ketapang dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas dukungan pendanaan dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Seminar "Peran Akademisi dan Masyarakat Pesisir Pulau Kecil dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Kalimantan Barat". Terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. (2019). Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023
- Iannuzzi, G., Santos, R., dan Mourato, J. M. (2019). The Involvement of Non-State Actors in the Creation and Management of Protected Areas: Insights from the Portuguese Case. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(9), 1674–1694. <https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1685475>
- Ioppolo, G., Saija, G., dan Salomone, R. (2013). From Coastal Management to Environmental Management: The Sustainable Eco-Tourism Program for the Mid-Western Coast of Sardinia (Italy). *Land Use Policy*, 31, 460–71. doi:10.1016/j.landusepol.2012.08.010.
- Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 89/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 90/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 91/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kendawangan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 92/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kubu Raya dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
- Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 93/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Paloh dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat
- Mínguez, C., Martínez-Hernández, C., dan Yubero, C. (2021). Higher Education and the Sustainable Tourism Pedagogy: Are Tourism Students Ready to Lead Change in the Post Pandemic Era? *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 29, 100329. doi:10.1016/j.jhlste.2021.100329.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.
- Pereira, J., Santos, M.J., Rosalino, L. M. (2021). Role of Local Communities in the Social Network of the Protected Area Management. *Conservation Science and Practice*, 1-11. doi: 10.1111/csp2.12664
- Pulido-Fernández, J.L., Cárdenas-García, P.J., dan Espinosa-Pulido, J.A. (2019). Does Environmental Sustainability Contribute to Tourism Growth? An Analysis at the Country Level. *Journal of Cleaner Production*, 213, 309–19. doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.151.
- Qodriatun, S.N. (2019). Peran Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi secara Kolaboratif. *Kajian*, 24(1), 43 – 56.
- Slocum, S.L., Dimitrov, D.Y., dan Webb, K. (2019). The Impact of Neoliberalism on Higher Education Tourism Programs: Meeting the 2030 Sustainable Development Goals with the Next Generation. *Tourism Management Perspectives*, 30, 33–42. doi:10.1016/j.tmp.2019.01.004.
- Sulaiman, A.I., Chusmeru, Kuncoro, B. (2019). The Educational Tourism (Edutourism) Development Through Community Empowerment Based on Local Wisdom and Food Security. *International Educational Research*, 2(3), 1-14.
- Sumarmi, S., Bachri, S., Purwanto, P., Zubaidah, S., Shrestha, R.P., dan Sholiha, A.W. (2022). Assessing Bedul Mangrove Ecotourism Using Green and Fair Strategy Empowerment to Fulfill SDGs 2030 Agenda for Tourism. *Environmental Research, Engineering and Management*, 78(2), 73-87. doi:10.5755/j01.erem.78.2.31006.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wibisono, G., Sardjono, M.A., Rujehan, Suhardiman, A. (2023). Community-based mangrove management in Berau Regency. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1192: 012019